



PEMERINTAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

RENJA RENCANA KERJA



Tahun :
2024

DINAS PERHUBUNGAN



dishub.tanjabbarkab.go.id



pl4n.dishub@gmail.com



Jl. Prof. Dr. Sri Sudewi Sh, Soedewi MS,
Kec. Bram Itam, Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, Jambi 36514



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : /Kep.Bup/DISHUB/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu di bentuk tim penyusun RKPD guna penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut:
- a. Pengarah : Bupati Tanjung Jabung Barat
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - c. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - d. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - e. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - f. Anggota (PNS) :
 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat
 2. Kepala Bidang Perhubungan Laut
 3. Muhammad Arsyad, SE
Kasubbag TU UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Abdul Malik, SE
Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- g. Anggota (Non PNS)
1. M. Wahyu Saputra
TKK DISHUB
 2. Junaidi, S.Kom.I
TKK DISHUB

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan Program/Kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa/kelurahan dan Kecamatan Tahun 2023 di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bahan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024;
- b. Menyusun Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- c. Melakukan verifikasi terhadap sub kegiatan di Renja OPD, Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan dan memberikan Rekomendasi Teknis pada setiap sub kegiatan melalui Aplikasi SIPD Kemendagri;
- d. Perumusan Program/Kegiatan Forum OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai bahan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024;
- e. Melaksanakan Musrenbang Kabupaten Tahun 2023 untuk Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2024;
- f. Merumuskan dan menyiapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- g. Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2023 apabila terjadi perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
- h. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ANWAR SADAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Illahi Rabbi, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024, telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah periode 11 (satu) tahun. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4).

Penyusunan Rencana Kerja ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024, sehingga target penetapan RKA/DPA- OPD Tahun 2023 dipenuhi sesuai jadwal yang disepakati antara pihak Bupati Tanjung Jabung Barat dengan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyelesaian rencana kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, anugrah dan hidayah-Nya.

Akhirulkalimat, mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kuala Tungkal, Agustus 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	10
A. Faktor Penyebab Terpenuhinya program dan kegiatan	48
B. Implikasi terhadap capaian Program/kKegiatan	49
C. Kebijakan Dan Solusi	50
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	51
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	62
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	65
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Program Masyarakat	
 BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	98
3.2 Tujuan dan Sasaran	100
3.2 Program dan Kegiatan	101
3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	115
 BAB IV KESIMPULAN	 116

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	12
Tabel TC. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2022-2025	52
Tabel TC. 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	67
Tabel TC. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Renstra.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi kepada dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 - 2023. Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan tahun 2021 – 2026, serta kebutuhan dana/ pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub agenda pembangunan konektivitas bidang perhubungan untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi yang menunjang pemerataan pengembangan jaringan transportasi dari daerah terpencil ke kota dan mendorong sebagai peluang peningkatan ekonomi masyarakat dan;
- b. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global;

- c. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.
- d. Meningkatnya tertib laik angkutan umum.
- e. Pemerataan konektivitas melalui pengembangan jaringan terayek antar kabupaten maupun antar desa.

Dari sub agenda bidang perhubungan tersebut tersebut, arah kebijakan dan strategi yang terkait langsung sektor transportasi antara lain :

- a) Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda
- b) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
- c) Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan
- d) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
- e) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
- f) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengintegrasikan keberhasilan program dengan pemanfaatan anggaran (APBD) yang optimal dan mendukung keberhasilan visi misi lingkup daerah/kabupaten, lingkup provinsi hingga lingkup nasional.

Sehingga memberikan efek nyata dan membantu mensejahterakan masyarakat melalui sektor perhubungan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000M(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja OPD) merupakan tahapan awal dalam penyusunan Renja OPD. Renja OPD itu sendiri merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sebagai acuan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- c. Terwujudnya pencapaian visi dan misi perhubungan yang mendorong terwujudnya pencapaian visi dan misi kabupaten tanjung jabung barat;

- d. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan perhubungan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar tingkat pemerintahan;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- f. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- g. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang renja OPD, proses penyusunan renja OPD, keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen OPD, Renstra OPD, dengan Renja K/ L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Memuat tentang undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD 2021-2026

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra OPD atau SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dianalisis disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan tersebut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Menjelaskan tingkat kinerja pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan hasil review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada setiap OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran

**BAB II****HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA OPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau Program Program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rancangan Awal Renja (Ranwal Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan,; 2) mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah

dilakukan dengan melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam masa RPJM Daerah tahun 2021 – 2026 sampai dengan tahun 2022. Keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2022 telah terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C. 29

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat
Sampai Dengan Tahun 2023

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisaasi Target Kinerja HasilProgram dan Keluaran Kegiatan S/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Maju Tahun 2025	
						Target Renja OPD Tahun 2022	Realiasasi Renja OPD Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENDAPATAN										
	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	Retbusi Gedung PKB										
	Retribusi Terminal										
	Retribusi Kepelabuhan										
	BELANJA										
	BELANJA TIDAK LANGUSNG										
	Belanja Gaji dan Tunjangan										
	BELANJA LANGSUNG										

RENCANA KERJA

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100	100,00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	81	16	16	16	100,0%	16	24	29,63%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	4	4	4	100,0%	4	12	48,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	18	3	3	3	100,0%	3	3	16,67%

RENCANA KERJA

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	5	5	5	100,0%	5	5	16,67%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	72	12/30	12/30	12/30	100,0%	12	12/30	15684,72%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	8	2	2	2	100,0%	12	2	25,00%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	48	8	8	8	100,0%	8	8	16,67%

RENCANA KERJA

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	100,0%	1	1	100,00%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	804	133	133	133	100,0%	134	134	16,67%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	792	132	132	132	100,0%	132	132	16,67%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	12	1	1	1	100,0%	2	2	16,67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	210	210	210	100,0%	12	210	291,67%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	51	6	6	6	100,0%	16	6	11,76%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	800	800	800	100,0%	12	800	1111,11%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undanganyang Disediakan	Dokumen	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	157	28	28	28	100,0%	27	27	17,20%

RENCANA KERJA

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	10	1	1	1	100,0%	2	0	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3	3	3	100,0%	1	3	100,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	60	10	10	10	100,0%	10	10	16,67%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6	1	1	1	100,0%	1	1	16,67%

RENCANA KERJA

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	60	10	10	10	100,0%	10	10	16,67%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	18	3	3	3	100,0%	3	3	16,67%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	1	1	1	100,0%	12	1	1,39%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72	1	1	1	100,0%	12	1	1,39%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	563	95	95	95	100,0%	95	95	16,87%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	2	2	2	100,0%	2	2	16,67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	192	32	32	32	100,0%	32	32	16,67%
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	324	54	54	54	100,0%	54	54	16,67%

RENCANA KERJA

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	35	7	7	7	100,0%	7	7	20,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100%	100	10000,00%
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	2	2	2	2	100,0%	1	1	50,00%
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	#DIV/0!	1	0	0,00%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	2	2	100,0%	0	1	100,00%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	300	80	80	80	100,0%	55	45	15,00%
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	190	50	50	50	100,0%	35	25	13,16%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	110	30	30	30	100,0%	20	20	18,18%
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	2	1	1	1	100,0%	1	0	0,00%
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	2	0	0	0	#DIV/0!	0	1	50,00%

RENCANA KERJA

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	0	0	0	0	#DIV/0!	1	-	#DIV/0!
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	0	0	#DIV/0!	1	-	#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	12	4	4	4	100,0%	100%	-	0,00%
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	100%	1	1	1	100,0%	1	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0	0	0	0	#DIV/0!	2	0	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	1	1	1	100,0%	1	1	25,00%

RENCANA KERJA

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	1	100%	100%	100%	100,0%	1000	100	10000,00%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	4	0	0	0	#DIV/0!	2	0	0,00%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparatur yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	6	2	2	2	100,0%	2	2	33,33%

RENCANA KERJA

	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	5.000	1000	1000	1000	100,0%	1000	1000	20,00%
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	4.000	1000	1000	1000	100,0%	1	1000	25,00%
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	8	2	2	2	100,0%	2	2	25,00%

RENCANA KERJA

	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	2	0	0	0	#DIV/0!	1	1	50,00%
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	32	8	8	8	100,0%	8	8	25,00%
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,0%	1	1	20,00%
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	200	36	36	36	100,0%	12	36	18,00%
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	15	3	3	3	100,0%	4	3	20,00%
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	4	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	5	1	1	1	100,0%	0	1	20,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00%
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	10	2	2	2	100,0%	1	2	20,00%

RENCANA KERJA

	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	10	2	2	2	100,0%	1	2	20,00%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	5	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	#DIV/0!	1	0	#DIV/0!
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	30	5	5	5	100,0%	5	5	16,67%

RENCANA KERJA

	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	100,0%	1	0	0,00%

RENCANA KERJA

	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	#DIV/0!	1	1	50,00%
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orangdalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	4	1	1	1	100,0%	1	1	25,00%
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	1	1	1	100,0%	100	1	33,33%
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	100,0%	100,0%	1	20,00%

RENCANA KERJA

	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,0%	1	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,0%	1	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
--	--	---	---	---	------	------	------	--------	------	------	---------

RENCANA KERJA

	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotadan /atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1	1	1	100,0%	1	1	20,00%
--	--	---	---------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

RENCANA KERJA

	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotadan /atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	72	12	12	12	100,0%	12	12	16,67%
--	--	--	---------	-----------	----	----	----	--------	----	----	--------

RENCANA KERJA

	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	#DIV/0!	3	0	0,00%

RENCANA KERJA

	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	15	3	3	3	100,0%	2	3	20,00%
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1	100%	100%	100%	100,0%	1	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	2	1	1	1	100,0%	1	0	0,00%
	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%

RENCANA KERJA

	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	16	10	10	10	100,0%	3	10	62,50%
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	8	2	2	2	100,0%	2	2	25,00%

RENCANA KERJA

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	4	1	1	1	100,0%	1	1	25,00%
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	1	100%	100%	100%	100,0%	100%	100%	100,00%
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	5	1	1	1	100,0%	2	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	17	4	4	4	100,0%	2	4	23,53%
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	4	1	1	1	100,0%	2	1	25,00%
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	5	0	0	0	#DIV/0!	1	1	20,00%
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	3	3	3	3	100,0%	1	3	100,00%
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	5	1	1	1	100,0%	100%	100%	20,00%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	0	1	1	1	100,0%	1	1	#DIV/0!
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	5	1	1	1	100,0%	100%	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	1	1	1	100,0%	1	1	#DIV/0!
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	5	1	1	1	100,0%	100%	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	0	1	1	1	100,0%	1	1	#DIV/0!
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	5	1	1	1	100,0%	100%	1	20,00%

RENCANA KERJA

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKPPelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0	1	1	1	100,0%	1	1	#DIV/0!
--	---	---	---------	---	---	---	---	--------	---	---	---------

Kuala Tungkal, Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19701223 199203 1 001

Pada tahun 2022 total anggaran Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat sebesar **Rp. 6.249.026.800,00** dengan rincian Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.610.177,00** dan Belanja Tidak Langsung **Rp. 2.094.257.443,00**, dan diuraikan dalam pelaksanaan **8 Program dan 24 Kegiatan**.

a. Faktor penyebab terpenuhinya dan permasalahan tidak terpenuhinya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat tahun 2020

Faktor Faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/kegiatan yang sesuai dengan target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.
3. Adanya sumber daya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selaras dengan pencapaian target masing-masing kegiatan.

Permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang awalnya dinas perhubungan, informatika dan komunikasi menjadi dinas perhubungan, sehingga anggaran belanja tidak langsung (gaji pegawai) di bidang informatika dan komunikasi tidak dapat direalisasikan dan menjadi silpa, yang berpengaruh terhadap rendahnya serapan anggaran dinas perhubungan
2. Peraturan di bidang Perhubungan, baik darat dan laut memerlukan kesamaan penafsiran untuk pelaksanaannya di segala tingkatan. Selain itu juga diperlukan harmonisasi peraturan perundangan bidang Perhubungan khususnya dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang kadang-kadang dilapangan menimbulkan kendala tersendiri untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah hukum di belakang hari.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah maupun kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas jumlah tentu memerlukan manajemen tersendiri untuk dapat menjalankan roda organisasi di Bidang/UPTD dilingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. diperlukan kebutuhan komposisi di Bidang Darat dan Laut juga yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan mengingat dua moda tersebut terdapat pekerjaan yang memerlukan keterampilan dan pengetahuan sesuai yang ditentukan.
4. Pengalokasian Anggaran Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pencapaian Indikator Kinerja. Kendala yang umumnya dihadapi oleh instansi adalah keterbatasan anggaran, sedangkan indikator yang harus dicapai berdasarkan RPJMD dan Renstra telah tertulis secara kuantitatif. Dengan adanya target atau angka/digit tertentu pada indikator tertentu, juga telah dapat ditentukan berapa Rupiah alokasi biaya yang diutuhkan untuk mencapainya. Namun indikator yang telah ditetapkan belum berbanding lurus dengan pengalokasian anggaran pada suatu program / kegiatan yang telah ditentukan, pada priode Rencana Tahunan yang telah disusun setiap tahunnya.
5. Pembangunan infrastruktur memerlukan biaya yang besar, hal ini juga dapat menjadi kendala. Biaya yang cukup besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur transportasi, memerlukan jalan keluar yang sistematis dan terukur, baik secara peraturan maupun penganggaran.

b. Implikasi yang timbul terhadap capaian program/kegiatan tahun 2022 :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Terjaganya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Terselenggaranya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Meningkatnya Keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jasa transportasi pada bidang darat maupun laut dengan Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi.
5. Menurunnya angka kecelakaan di bidang perhubungan darat dan laut.
6. Meningkatnya PAD pada sektor Terminal, Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Kepelabuhan

7. Meningkatnya tertib laik kendaraan angkutan umum yang memenuhi standar.

c. Kebijakan/solusi untuk mengatasi faktor-faktor tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan SDM Perhubungan.
2. Menjamin adanya pemeliharaan serta tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.
4. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembinaan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.
5. Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, telah ditetapkan indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis

1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan.

Indikator:

- 1.1.1. Indeks Konektivitas Jaringan Jalan
- 1.1.2. Indeks Konektivitas Pedesaan
- 1.1.3. Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat
- 1.1.4. Persentase Prasaranan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan Yang Tersedia Berbanding Dengan Kebutuhan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam (table T-C.30) sebagai berikut :

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

TABEL T-C 30

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022-2025

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Fokus Layanan Urusan Wajib													
7	PERHUBUNGAN												
7,1	Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	Dok	2		5	5	3	3					
7,2	Pemeliharaan Halte Sungai	Lokasi	1		3	3	3	0					
RPJMD BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN													
1	Tersedianya Jumlah pelabuhan laut/LLASDP dan terminal bus	Unit	5		1	1	1	1	0	0	2	3	
2	Tersedianya Halte dan Dermaga Sungai Kondisi Baik	Unit	13		3	4	3	3	3	3	3	3	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERHUBUNGAN													
1. PELAYANAN ANGKUTAN JALAN													
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan												

RENCANA KERJA

1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	%	75		75	75	75	75	98	98	98	98	
2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	95	95	95	95	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan												
1) Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	%	40		40	40	40	40	38	38	38	38	

RENCANA KERJA

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				2021
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	20
c. Fasilitas Perlengkapan Jalan													
	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	57,8	57,4	57,8	57,8	
d. Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor													
	1) Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	%	60		60	60	60	60	27,8	20,4	21,8	27,8	
e. Sumber Daya Manusia (SDM)													
	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	%	50		50	50	50	50	10	10	10	20	
	2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	%	100		100	100	100	100	10	10	10	20	

RENCANA KERJA

	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	%	40		40	40	40	40	5	5	5	5	
	4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	%	100		100	100	100	100	10	11	12	12	
f. Keselamatan													
	1) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	96,7	97,7	98	98,1	
2. PELAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU													
a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	76		76	76	76	76	50	50	70	75	

RENCANA KERJA

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten/Kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	%	40		40	40	40	40	47	47	47	48	
b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau													
	1) Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
c. Keselamatan													
	2) Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	98	98,7	98,7	98,7	

RENCANA KERJA

	d. Sumber Daya Manusia												
	3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	%	50		50	50	50	50	47	48	48,5	48,5	
3. PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN													
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan												
	1) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	60		60	60	60	60	58	58	58	58	

RENCANA KERJA

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
	b. Tersedianya Prasarana Angkutan Penyeberangan												
	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	%	60		60	60	60	60	50	50	50	50	
	c. Keselamatan												

RENCANA KERJA

	1). Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	87	87	89	90	
	d. Sumber Daya Manusia												
	2). Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	%	50		50	50	50	50	46	48	48,5	48,5	
4. PELAYANAN ANGKUTAN LAUT													
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut												
	1). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	90		90	90	90	90	88	88	88	89	

RENCANA KERJA

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET SPM	TARGET IKK/RPJMD	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE -				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISI
					2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2). Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten/Kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	100		100	100	100	100	98	98	98	98	
	b. Jaringan Pelayanan Prasarana Angkutan Laut												
	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	%	60		60	60	60	60	65	65	65	65	

RENCANA KERJA

c. Keselamatan													
	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
c. Sumber Daya Manusia (SDM)													
	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	%	100		100	100	100	100	97	97	97	97	
LPPD BIDANG PERHUBUNGAN													
1	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	50		50%	60 %	65 %	70 %	40%	50%	54%	60%	
2	V/c Ratio	Rasio	A		A	A	A	A	0,35 (A)	0,20 (A)	0,30 (A)	0,35 (A)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan.

Pembangunan yang akan datang menghadapi banyak tantangan akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi dunia yang mengakibatkan kegiatan pembangunan daerah akan semakin terkait dengan perkembangan internasional. Transportasi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan pembangunan daerah. Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi baik serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

Kemajuan di bidang Komunikasi dan Informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Penggunaan perangkat komunikasi untuk mengakses informasi telah menjadi kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran Pemerintah sebagai regulator dalam penempatan jaringan telekomunikasi agar layanan komunikasi dan informatika dapat menjangkau seluruh wilayah dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

- 2. Adapun tantangan urusan wajib yang ada di Dinas Perhubungan adalah:**
- Mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat sebagai sumber pendanaan pembangunan sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjab Barat;
 - Meningkatkan pelayanan angkutan seiring kepadatan yang disebabkan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi;
 - Melaksanakan pemungutan retribusi di bidang perhubungan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
- 3. Permasalahan, Dampak/peluang Tantangan dan Peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terhadap sasaran Kabupaten. Tanjung Jabung Barat**

Urusan Perhubungan

- STRENGTHS (KEKUATAN):
 - Komitmen dan kompetensi sumber daya manusia di beberapa bagian/unit.
 - Sarana dan prasarana yang relatif memadai.
 - Regulasi yang mendukung.
- WEAKNESSES (KELEMAHAN):
 - Kompetensi SDM secara keseluruhan masih perlu ditingkatkan, khususnya di bidang non teknis;
 - Anggaran yang kurang memadai;
 - Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka da guardrail) dan penerangan jalan Kabupaten;
 - Belum tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah antara Kecamatan dan Desa-desa ke Kabupaten.
 - Sarana dan prasarana di beberapa unit harus diperbaiki.
- OPPORTUNITIES (PELUANG) :
 - Tersedianya angkutan umum yang melayani sebagian Wilayah Kabupaten sehingga memberi Harapan masyarakat terhadap peningkatan Pelayanan Publik Dishub;
 - Kesadaran masyarakat akan kebutuhan keselamatan dalam bertransportasi.

3. Rencana pembangunan infra struktur diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Adanya regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub.
 5. Semakin meningkatnya keterbukaan informasi publik melalui media massa cetak dan elektronik sehingga masyarakat/stakeholder dapat memberikan aspirasi yang positif untuk Dishub.
- d. THREATS (ANCAMAN):
1. Adanya kepentingan pihak tertentu yang tidak mendukung upaya peningkatan kualitas perhubungan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Keterbatasan lahan jalan di Kabupatenn Tanjung Jabung Barat karena makin meningkatnya pemukiman (residensial) sehingga peluang memperlebar jalan untuk memperlancar transportasi menjadi sulit;
 3. Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunakan kendaraan pribadi dan tidak dapat dibendung penambahan unit kendaraan pribadi
- e. Adapun Isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :
1. kepada masyarakat dalam jangka panjang.Mengoptimalkan peran Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis pengendali dan pengawasan transportasi yang telah dijabarkan dalam tugas dan fungsinya.
 2. Peraturan perundangan dan pertentangan kepentingan peraturan perundangan sektoral berpengaruh besar terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun dan berpotensi adanya ketidak konsistenan perencanaan dan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan evaluasi program/kegiatan;
 3. Integrasi perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya implementasi integrasi perencanaan dan perencanaan berdampak pada tidak tercapainya target indikator kinerja program/kegiatan;
 4. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai, ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, hal ini dikarenakan masih lemahnya manajemen data dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan;

5. Monitoring dan evaluasi yang belum optimal, belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian;
6. Kapasitas aparatur perencana, kapasitas sumber daya perencana, kapasitas sumber daya perencana yang berkompeten menjadi permasalahan serius dalam peningkatan kualitas perencanaan sebagai akibat promosi jabatan dan aparatur purna tugas yang tidak diimbangi dengan kaderisasi serta adanya moratorium penerimaan pegawai baru;
7. Kurang antusiasnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan terutama dalam MUSRENBANG baik mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten;
8. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait Forum LLAJ.
9. Harapan masyarakat terhadap target kinerja pemerintah daerah sangat optimis, sehingga peran perencanaan dan evaluasi sangat vital untuk mencapai target tersebut.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman Perencanaan Pembangunan dengan membandingkan program dari pemerintah kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program untuk dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan kota/kabupaten.

Rancangan awal untuk RKPD Tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, Proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja daerah untuk 2023 sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah
2. Dukungan RPJMN 2021 – 2026;

3. Penggunaan dana fungsi pendidikan ;
4. Bantuan dari Pemerintah Pusat Kementerian Perhubungan RI dan Pemerintah Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
5. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
6. Pendukungan implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Perhubungan dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Hasil telaahan terhadap review rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 disajikan dalam Tabel T.C-31 sebagai berikut:

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2024			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
4	5	6	7	8	9	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	Dishub	100%	Rp 7.917.765.434,70	Dishub	100%	Rp 7.917.765.434,70	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	Dishub	16	Rp 71.000.000,00	Dishub	16	Rp 71.000.000,00	

RENCANA KERJA

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Dishub	4	Rp 12.000.000,00	Dishub	4	Rp 12.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	Dishub	1	Rp 5.000.000,00	

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp -	Dishub	1	Rp -	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 4.000.000,00	Dishub	1	Rp 4.000.000,00	

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Dishub	3	Rp 20.000.000,00	Dishub	3	Rp 20.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Dishub	5	Rp 25.000.000,00	Dishub	5	Rp 25.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000,00	Dishub	100%	Rp 5.185.000.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000	Dishub	12/30	Rp 5.000.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dishub	2	Rp 180.000.000	Dishub	2	Rp 180.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	Dishub	1	Rp 5.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	Dishub	100%	Rp 110.000.000,00	Dishub	100%	Rp 110.000.000,00	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	1	Rp 5.000.000	Dishub	1	Rp 5.000.000	

RENCANA KERJA

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Dishub	8	Rp 100.000.000	Dishub	8	Rp 100.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah LaporanRekonsiliasi danPenyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD	Laporan	Dishub	1	Rp 5.000.000	Dishub	1	Rp 5.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	Dishub	133	Rp 225.000.000,00	Dishub	133	Rp 225.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Dishub	132	Rp 195.000.000	Dishub	132	Rp 195.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Dishub	1	Rp 30.000.000,00	Dishub	1	Rp 30.000.000,00	

RENCANA KERJA

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Dishub	100%	Rp 601.590.433,80	Dishub	100%	Rp 601.590.433,80	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	210	Rp 4.990.434	Dishub	210	Rp 4.990.434	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	6	Rp 75.000.000	Dishub	6	Rp 75.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 25.000.000	Dishub	12	Rp 25.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Dishub	800	Rp 25.000.000	Dishub	800	Rp 25.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Dishub	12	Rp 95.000.000	Dishub	12	Rp 95.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dishub	12	Rp 6.600.000	Dishub	12	Rp 6.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Dishub	12	Rp 370.000.000	Dishub	12	Rp 370.000.000	

RENCANA KERJA

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	Dishub	28	Rp 445.000.000,00	Dishub	28	Rp 445.000.000,00	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		1	Rp 50.000.000		1	Rp 50.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp 120.000.000,00	Dishub	3	Rp 120.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		10	Rp 50.000.000		10	Rp 50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		1	Rp 50.000.000		1	Rp 50.000.000	

RENCANA KERJA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	10	Rp 100.000.000	Dishub	10	Rp 100.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Dishub	3	Rp 75.000.000	Dishub	3	Rp 75.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	Dishub	12	Rp 160.208.780,90	Dishub	12	Rp 160.208.780,90	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Dishub	12	Rp 1.316.185	Dishub	12	Rp 1.316.185	

RENCANA KERJA

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 140.000.000	Dishub	1	Rp 140.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Dishub	1	Rp 18.892.596	Dishub	1	Rp 18.892.596	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	Dishub	95	Rp 1.119.966.220	Dishub	95	Rp 1.119.966.220	

RENCANA KERJA

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Dishub	2	Rp 200.000.000	Dishub	2	Rp 200.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Dishub	32	Rp 531.300.000	Dishub	32	Rp 531.300.000	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Rp -	54	Rp 28.666.220	Rp -	54	Rp 28.666.220	

RENCANA KERJA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Dishub	7	Rp 360.000.000	Dishub	7	Rp 360.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%		100%	Rp 2.185.000.000		100%	Rp 2.160.000.000	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dishub	2	Rp 50.000.000	Dishub	2	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	2	Rp 50.000.000	Dishub	2	Rp 50.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	Dishub	80	Rp 250.000.000	Dishub	80	Rp 250.000.000	
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Dishub	50	Rp 200.000.000	Dishub	50	Rp 200.000.000	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	30	Rp 50.000.000	Dishub	30	Rp 50.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	Dishub	100%	Rp 115.000.000	Dishub	100%	Rp 115.000.000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	Dishub	1	Rp 75.000.000	Dishub	1	Rp 75.000.000	
Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	4	Rp 40.000.000	Dishub	4	Rp 40.000.000	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	

RENCANA KERJA

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	Dishub	100%	Rp 250.000.000	Dishub	100%	Rp 250.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklatJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	Dishub	2	Rp 40.000.000	Dishub	2	Rp 40.000.000	
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	Dishub	1000	Rp 40.000.000	Dishub	1000	Rp 40.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Dishub	1000	Rp 50.000.000	Dishub	1000	Rp 50.000.000	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Dishub	2	Rp 20.000.000	Dishub	2	Rp 20.000.000	
Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	Dishub	8	Rp 100.000.000	Dishub	8	Rp 100.000.000	

RENCANA KERJA

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	Dishub	100%	Rp 1.070.000.000	Dishub	100%	Rp 1.070.000.000	
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 70.000.000	Dishub	1	Rp 70.000.000	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	36	Rp 970.000.000	Dishub	36	Rp 970.000.000	

RENCANA KERJA

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp 30.000.000	Dishub	3	Rp 30.000.000	
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	Dishub	2	Rp 75.000.000	Dishub	2	Rp 50.000.000	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	2	Rp 75.000.000	Dishub	2	Rp 75.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 175.000.000	Dishub	100%	Rp 175.000.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	5	Rp 175.000.000	Dishub	5	Rp 175.000.000	
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 150.000.000	Dishub	100%	Rp 150.000.000	
Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 150.000.000	Dishub	1	Rp 150.000.000	

RENCANA KERJA

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	Rp -	1	Rp 10.000.000	Rp -	1	Rp 10.000.000	

RENCANA KERJA

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	Dishub	100%	Rp 7.590.000.000	Dishub	100%	Rp 7.590.000.000	
Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	Dishub	100%	Rp 15.000.000	Dishub	100%	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
---	--	---------	--------	---	----	---	--------	---	----	---

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp	15.000.000	Dishub	100%	Rp	15.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secaraElektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinPelabuhan Sungai dan Danau yang MelayaniTrayek dalam 1 Daerah Kabupaten/KotaKewenangan Kabupaten/Kota dalam SistemPelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
---	---	---------	--------	---	----	---	--------	---	----	---

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Penetapan Lintas Penyeberangan dan PersetujuanPengoperasian Kapal dalam DaerahKabupaten/Kota yang Terletak pada JaringanJalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan JalurKereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan PersetujuanPengoperasia n Kapal dalam DaerahKabupaten/Kota yang Terletak pada JaringanJalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan JalurKereta Api Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 1.100.000.000	Dishub	100%	Rp 1.100.000.000	

RENCANA KERJA

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000	
--	---	---------	--------	---	----	------------	--------	---	----	------------	--

RENCANA KERJA

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotadan/atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	12	Rp	1.090.000.000	Dishub	12	Rp	1.090.000.000	
---	--	---------	--------	----	----	---------------	--------	----	----	---------------	--

RENCANA KERJA

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	Dishub	100%	Rp 10.000.000	Dishub	100%	Rp 10.000.000	
Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Penyediaan Data dan Informasi Tarif AngkutanPenyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi danKendaraan beserta Muatannya pada LintasPenyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Dishub	3	Rp 10.000.000	Dishub	3	Rp 10.000.000	

RENCANA KERJA

Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	100%	Rp 1.500.000.000	Dishub	100%	Rp 1.500.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	1	Rp 1.500.000.000	Dishub	1	Rp 1.500.000.000	

RENCANA KERJA

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-

RENCANA KERJA

Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp 535.000.000	Dishub	100%	Rp 535.000.000	
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	10	Rp 500.000.000	Dishub	10	Rp 500.000.000	

RENCANA KERJA

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Dishub	2	Rp	25.000.000	Dishub	2	Rp	25.000.000	
--	---	---------	--------	---	----	------------	--------	---	----	------------	--

RENCANA KERJA

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	Dishub	1	Rp	10.000.000	Dishub	1	Rp	10.000.000
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-	
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-	

RENCANA KERJA

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	Dishub	100%	Rp 4.355.000.000	Dishub	100%	Rp 4.355.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	Dishub	1	Rp 2.500.000.000	Dishub	1	Rp 2.500.000.000	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	Dishub	4	Rp 850.000.000	Dishub	4	Rp 850.000.000	

RENCANA KERJA

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	Dishub	1	Rp 10.000.000	Dishub	1	Rp 10.000.000	
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	Dishub	3	Rp 995.000.000	Dishub	3	Rp 995.000.000	
Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	

RENCANA KERJA

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Dishub	0	Rp	-	Dishub	0	Rp	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	Dishub	1	Rp	15.000.000	Dishub	1	Rp	15.000.000

RENCANA KERJA

Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	Dishub	0	Rp -	Dishub	0	Rp -	

RENCANA KERJA

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	Dishub	1	Rp 15.000.000	Dishub	1	Rp 15.000.000	
					Rp 17.692.765.435			Rp 17.667.765.435	

Kuala Tungkal, Agustus 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Penyelia Utama Muda
NIP. 19761223 199203 1 001

2.5. Penelaahan Usulan Program Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan di bidang perhubungan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Dinas Perhubungan dalam hal ini mengkoordinasikan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Tabel T-C 32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KAUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Nama OPD : Dinas Perhubungan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN PLAYARAN				
Kegiatan	Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	-	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	-
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang	Dokumen rencana induk DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau Serta Dokumen Perencanaan Pembangunan Halte Sungai	1 Dokumen	Pembangunan Halte Sungai/Dermaga Sungai Desa Lumahan RT. 02 Kecamatan Senyerang
		Desa Pelabuhan dagang		1 Dokumen	Pembangunan Dermaga TBS di Daerah Teluk

2.6. Penelaah Terhadap Usulan Musrenbang dan Pokir DPRD

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja menjadi Rancangan Renja OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 131 ayat (1) “Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 130.

Proses pelaksanaan Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Opd melalui Rapat Forum Perangkat Daerah dalam Rangka RKPD Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Hari Jumat, Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2023 di Ruang Rapat pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyepakati hal – hal sebagai berikut :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyetujui program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kecamatan dan pokir DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- KEDUA** : Menyetujui daftar usulan Musrenbang Kecamatan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini
- KETIGA** : Menyetujui berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II & III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini.
- KEEMPAT** : Rancangan Awal Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Kepmendari 50 Tahun 2021, yang memuat 3 Program,, 30 Kegiatan dan 72 Sub kegiatan .
- KELIMA** : Relevansi Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dengan Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat termuat dalam poin 1 (kesatu) yaitu “ Membangun jalan dan jembatan penghubung antar desa, kecamatan, kabupaten, dan perbatasan”.
- Dalam Rancangan Awal Renja Tahun 2024 telah termuat 13 Usulan Pokir

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

- KEENAM** : DPRD dan 21 Usulan dari Musrenbang serta direkap melalui aplikasi SIPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Untuk 13 usulan Pokir DPRD akan ditelaah dan disesuaikan dengan Pagu
- KETUJUH** : Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024.
Penyediaan Fasilitas Parkir di Desa Tanjung Senjulung Untuk Persiapan
- KEDELAPAN** : MTQ tingkat Kabupaten di Kecamatan Seberang Kota
Capaian RPJMD untuk kegiatan pemeliharaan pelabuhan sungai belum
- KESEMBILAN** : terpenuhi dikarenakan keterbatasan anggaran
Target dan anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan
- KESEPULUH** : Danau untuk ditambah
Indikator Kinerja Renja 2024 sudah baku dan sesuai dengan aplikasi SIPD
- KESEBELAS** : Usulan tambahan dari Kecamatan Pengabuan yaitu kerusakan jalan di
- KEDUABELAS** : daerah lintas teluk nilau desa sungai baung karena merupakan akses utama dari desa ke kota
Pembangunan halte sungai RT. 04 Kelurahan Senyerang untuk di
- KETIGABELAS** : prioritaskan dalam APBDP Tahun 2023
Dinas PU mendukung penuh dengan kegiatan yang memang berkaitan
- KEEMPATBELAS** : dengan tupoksi Dinas PU.
Usulan Musrenbang sudah ditelaah dan dituangkan dalam Lampiran III.

LAMPIRAN USULAN POKIR DPRD DAN MUSRENBANG TAHUN 2023 :

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2023

Daftar Usulan Kegiatan Lintas perangkat Daerah dan Lintas Wilayah Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	PENGUSUL	FRAKSI	KAMUS USULAN	PERMASALAHAN	LOKASI			Kooefisien	OPD Pengampu	Rekomendasi OPD
					Alamat	Kecamatan	Kel/Desa			
1	AHMAD JAHFAR, SH	GOLKAR	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERENCANAAN DERMAGA BONGKAR MUAT	DESA PASAR SENIN KECAMATAN PENGABUAN, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Pasar Senin	1 KEGIATAN	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
2	AHMAD JAHFAR, SH	GOLKAR	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN PELABUHAN BURUH	DESA PASAR SENIN, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Pasar Senin	1 KEGIATAN	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
3	SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP	GOLKAR	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	REHAB BERAT	DERMAGA NELAYAN TOGOK PADA IDI RT.01 DUSUN SENTOSA DESA TUNGKAL I KECAMATAN TUNGKAL ILIR, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Tungkal I	1 KEGIATAN	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

RENCANA KERJA

4	Drs. MUKRI	NASDEM PPP	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Dermaga Pompong P 50 M X L 2 M	Jalan Delima RT 10, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Kampung Nelayan	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
5	H. ABDULLAH, SE	PDI P	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN DERMAGA	DESA SUNGAI DUALAP KEC. KUALA BETARA, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Sungaidualap	1 KEGIATAN	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
6	H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.	PAN	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PERMBUATAN DERMAGA TAMBATAN PERAHU (KAYU) VOLUME 2 X 30 M	RT 08 PARIT BATU PAHAT DESA MEKAR ALAM KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Mekar Alam	1 KEGIATAN	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
7	MUHAMMAD ZAKI, ST	PKB	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PENYEMPURNAAN PELABUHAN POMPONG TAMBANG KAYUH BAIMBAI K/B (PELABUHAN TERAPUNG)	JLN. AMPERA KUALA TUNGKAL, Kab. Tanjung Jabung Barat	Tungkal Ilir	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

RENCANA KERJA

8	HASBI	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBANGUNAN/PE RBAIKAN REHAB DERMAGA VOLUME P 8 M X L 6 M	RT. 07 KELURAHAN BRAM ITAM KIRI, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Bram Itam Kiri	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
9	HASBI	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	PEMBUATAN DERMAGA APUNG	KUALA PARIT SAPAT DESA KUALA BARU KECAMATAN SEBERANG KOTA, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Baru	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
10	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Halte Sungai	Jln. Harmoko RT 001, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsengulang	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
11	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Halte Sungai	RT 01 Pasar Rebo Dusun Perdana, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Pantaigading	1 Kegiatan	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

RENCANA KERJA

12	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Halte Sungai (Sarana Penyebrangan Masyarakat dan Kendaraan)	RT.06 Parit Keramat, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	1 Unit	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
13	JAMAL DARMAWAN SIE, SE. MM	TANJUNG JABUNG BARAT BERSATU	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai daerah kabupaten/kota	Pembangunan Halte Sungai	Lorong K. H. Rasyid RT 05, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Semau	1 Paket	DISHUB	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

REKAP USULAN MUSRENBANG DARI APLIKASI SIPD

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN	REKOMENDASI
USULAN MUSRENBANG								
A. KECAMATAN KUALA BETARA								
1	Harmanto	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	8. Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai (1 Paket)	Rt. 02 Dusun Teladan, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Sungai dualap	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

RENCANA KERJA

2	Edi Arispianto. R	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	3. PEMBANGUNAN DERMAGA/ HALTE SUNGAI RT.05 DUSUN BETARA MAKMUR 1 Paket	RT.05 DUSUN BETARA MAKMUR, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Betara Kanan	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
3	IBRAHIM	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Halte Sungai 1 Paket	RT. 001 Dusun Karya Jaya, Kab. Tanjung Jabung Barat	Kuala Betara	Suak Labu	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN	REKOMENDASI
B. KECAMATAN SEBERANG KOTA								
1	Muslim	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	4. Halte sungai RT. 02 Parit Sapat Panjang 3 x 100 M	Parit Sapat RT. 02, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Kuala Baru	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan sudah selesai
2	Sahwani	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	2. halte sungai	PARIT KERAMAT RT. 06, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Muaraseberang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024

RENCANA KERJA

3	A. Wahab	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	15. Pembangunan Halte Sungai	Jl H Ibrahim Rt 06 Dusun Pidada, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Tungkal IV Desa	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan sudah selesai dengan APBD Provinsi
4	Abdul Fatah	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	18. HALTE SUNGAI 2 x 60 Meter	RT 05, Kab. Tanjung Jabung Barat	Seberang Kota	Harapan Jaya	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan Sudah Selesai
NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN	REKOMENDASI
C. KECAMATAN BRAM ITAM								
1	Supian Kahpi	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	4. Pembangunan Halte Sungai	Lokasi Lorong K.H Rasyidi RT. 05 Desa Semau, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Semau	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan Sudah Selesai
2	M. Makhrus	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	(cadangan)pembangunaan halte sungai di Rt 01 Pasar Rebo	RT 01 Pasar rebo Dusun Perdana, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Pantaigading	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui dan Akan dilakukan survey titik lokasi perencanaan pembangunan halte sungai

RENCANA KERJA

3	H. Mardani	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	6.PEMBANGUNAN HALTE	JALAN HARMOKO RT 001, Kab. Tanjung Jabung Barat	Bram Itam	Tanjungsengulang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN	REKOMENDASI
D. KECAMATAN PEGABUAN								
1	Muhaimin	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	2.Pembangunan Pelabuhan Bongkar Muat	RT 08 Dusun Utama, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Pasar Senin	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
2	M. Saidin	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	12. pembangunan halte sungai rt 02 1 kegiatan	dusun karya indah rt 02, Kab. Tanjung Jabung Barat	Pengabuan	Karya Maju	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan Sudah Selesai
NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	OPD TUJUAN	REKOMENDASI
E. KECAMATAN SENYERANG								

RENCANA KERJA

1	Sutiman	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Belum tersedia Dermaga apung, Kondisi saat ini hanya dermaga kayu dan kondisi rusak, mohon bantuan 3 unit dermaga apung	Parit 4 RT.07, Parit 7 RT.14, Tanjung mawar RT.03 Desa Sungai Kayu Aro, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungai kayu Aro	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Perencanaan Sudah Selesai di tahun 2021
3	Kelurahan Senyerang	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	PRIORITAS 1 Pembangunan Dermaga Bongkar Muat	RT. 04 Kelurahan Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Senyerang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Untuk diusulkan di APBDP Tahun 2023
4	Taslim, S.A.P	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	4. HALTE SUNGAI VOLUME 1 PAKET	RT 04 dusun Mekar, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungailandak	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Direncanakan untuk dermaga sungai terpadu
5	Taufiq Rahman, SE.Sy	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	31. Pengembangan Dermaga Halte Sungai Menjadi Halte Penyebrangan Mobil	Parit Pasirah, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungaikepayang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	

RENCANA KERJA

6	Kelurahan Senyerang	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	Pembangunan Halte Sungai Kel. Senyerang	RT. 05 Kel. Senyerang, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Senyerang	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
7	Taslim, S.A.P	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	5. Dermaga penyebrangan Roda 4 Volume 1 PAKET	Dusun karya baru RT 05, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungailandak	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024
9	Choiri	Pembangunan Dermaga Apung / Halte Sungai	pembangunan jerambah bongkar muat rt.002 (volume 50 m x 30 m)	dusuu suka mulya rt.002, Kab. Tanjung Jabung Barat	Senyerang	Sungairambai	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	Usulan Disetujui untuk di input kedalam dokumen renja tahun 2024 (bersebrangan dengan sungai dungun)

**BAB III****TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional****a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan**

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang.

Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

b. Prioritas Pembangunan Nasional Bidang Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk system informasi lalu lintas

perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan dan angkutan umum perkotaan.

c. VISI DAN MISI RPJMD

Visi RPJMD	"MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH" <i>(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</i>
Misi RPJMD :	
Misi 1	: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
Misi 2	: 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
Misi 3	: 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
Misi 4	: 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
Misi 5	: 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Dinas perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi 5 RPJMD yaitu Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota. Dengan tujuan 5.1 yaitu Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dan sasaran 5.1.2 yaitu Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah (TABEL 3.2

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir RENSTRA
				2022	2023	2024	2025	2026	
1. Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.1. Meningkatnya Akseibilitas Masyarakat Melalui Ketersediaan Sarana Dan Prasana Taransportasi Darat Dan Laut	1.1.1. Persentase Trayek Angkutan Darat Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.2. Jumlah Halte Sungai Yang Tersedia	1 Unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 Unit
		1.1.3. Persentase Armada Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedia	40%	45%	50%	55%	60%	65%	65%
		1.1.4. Kapasitas Ruas Jalan Yang Baik	B	B	A	A	A	A	A
	1.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Laut	1.2.1. Jumlah Sarana dan Prasarana Angkutan Darat dan Laut Yang Tersedua	30 Unit	35 Unit	40 Unit	45 Unit	50 Unit	55 Unit	255 Unit
		1.2.2. Jumlah Kendaraan Yang Memenuhi Laik Angkutan Jalan	1150 Unit	1170 Unit	1180 Unit	1210 Unit	1300 Unit	1350 Unit	1350 Unit
		1.2.3. Prediksi Menurunnya Jumlah Angka Kecelakaan Darat dan Laut	50 Kasus	40 Kasus	30 Kasus	20 Kasus	10 Kasus	5 Kasus	5 Kasus

RENCANA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2024

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	70	70	78	80	80	85	85 (A)
		2.1.2. Nilai AKIP	CC	CC	B	B	BB	BB	BB
		2.1.3. Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	0 Temuan	0	0	0	0	0	0 Temuan

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dirumuskan, disusun sejumlah rencana program dan kegiatan disertai dengan rumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program.

Program dan kegiatan yang perlu direncanakan dalam sisa periode Renstra 2022-2025 agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan mampu dicapai. Terdapat 9 program yang dilaksanakan dalam kurun waktu periode Renstra Perubahan 2022 -2025 adalah sebagai berikut:

A. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan.

1. Sebagai Relevansi Visi dan Misi Kepala Daerah
2. Peningkatan Potensi Ekonomi Daerah
3. Meningkatkan aksesibilitas untuk masyarakat daerah dari desa sampai ke kota.

b. Uraian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah**Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

3. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

- b. Pembangunan Gedung Terminal
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C

4. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- c. Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- d. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

f. Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

g. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian erkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaluLintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

b. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

c. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin

b. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

d. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan

11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

12. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota

5. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

6. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

7. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

8. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- b. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
- c. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
- d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

9. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal

10. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal

11. Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal

12. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Sub Kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal

Rekapitulasi jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Program Rutin terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 20 kegiatan.
- b. Program Wajib terdiri dari, 5 program dengan total kegiatan 14 kegiatan.

Dapat di totalkan keseluruhan Setiap OPD terdiri dari program rutin dan program wajib adalah 10 program, terdiri 34 kegiatan

B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan kegiatan dalam setiap programnya.

C. KELOMPOK SASARAN

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Masyarakat pengguna jalan dan pengguna kendaraan bermotor ;
2. Pemilik kendaraan umum angkutan orang dan kendaraan barang ;
3. Pemilik angkutan orang dan/atau barang di perairan;
4. Semua pihak yang berkepentingan pada urusan perhubungan.

3.3 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Rencana target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana Tabel di bawah

Tabel**Prediksi Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Target (Rp)
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp. 120.000.000,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 200.000.000,00
2	Retribusi Terminal	Rp. 90.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Rp. 250.000.000,00
	Jumlah	Rp. 660.000.000,00

**Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator
Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)**

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT						17.687.765.435,00							14.994.249.974,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.687.765.435,00							14.994.249.974,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						17.637.765.435,00							14.944.249.974,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100 %			100 %	7.912.765.435,00						100 %	8.034.249.974,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	16 Dokumen			16 Dokumen	71.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	16 Dokumen	72.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan OPD</i>	100 % 100 %			100 %	5.180.000.000,00			-	4. Penyele nggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	5.185.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	5.000.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	180.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	100 % 100 %			100 %	110.000.000,00			-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai/ASN	134 Orang 134 Orang			133 Orang	225.000.000,00			-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	134 Orang 134 Orang	255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				132 Paket	195.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		195.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	30.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 % 100 %			100 %	601.590.434,00			-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	611.590.434,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				210 Paket	4.990.434,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		4.990.434,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	95.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	140.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	18.892.596,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		22.671.115,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	95 Unit 95 Unit			95 Unit	1.119.966.220,00			-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	95 Unit 95 Unit	1.131.672.240,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	531.300.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		531.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	28.666.220,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		30.372.240,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	360.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		370.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	100 %			100 %	2.135.000.000,00						100 %	1.770.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	300 Unit 300 Unit			80 Unit	250.000.000,00			-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	45 Unit 45 Unit	135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				50 Unit	200.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				30 Unit	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Tungkal II	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 % 100 %			100 %	115.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Sriwijaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				4 Orang	40.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 - Ketertahanan dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	4 Dokumen 4 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT	0 Dokumen 0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Sungainibung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 % 100 %			100 %	250.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	255.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	40.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Sungainibung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketertahanan dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar</i>				1000 Unit	40.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				8 Unit	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>				8 Unit	100.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Betara, Terjun Gajah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan</i>	100 % 100 %			100 %	1.070.000.000,00			-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	1.090.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				36 Laporan	970.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		980.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkai Ilir, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum 3.Mewujud kan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	DISHUB KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 - Ketenter aman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	DISHUB KAB. TANJAB BARAT		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	-	10 Razia/Operassi Gabungan 10 Razia/operasi gabungan			-	75.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	KEC. BRAM ITAM KAB. TANJAB BARAT	2 Razia/Operassi Gabungan 2 Razia/operasi gabungan	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	KEC. BRAM ITAM KAB. TANJAB BARAT		75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %			100 %	175.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	175.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		175.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	150.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.12.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN KAB. TANJAB BARAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	KEC. TUNGKAL ILIR	100 % 0 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			<i>Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Unit	15.000.000,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	KEC. TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Angkutan Kelas Ekonomi Yang Tersedia</i>	5 Dokumen 5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	1 Dokumen 1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.02.2.16.0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3.Mewujudkan Ketentr Aman dan Ketertiban Umum	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	<i>Tingkat pemenuhan Pelayanan Pelayaran</i>	100 %			100 %	7.590.000.000,00						100 %	5.140.000.000,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.04	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	2 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100 % 100 %			100 %	1.100.000.000,00			-	1 - Peningk atan Produ ktivitas Daerah 4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	1.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.06.0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 - Peningkatan Produk- tivitas Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	1.090.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 - Peningkatan Produk- tivitas Daerah 4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT		1.090.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 % 100 %			100 %	10.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.09.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 % 100 %			100 %	1.500.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KEC. TUNGKAL ILIR KAB. TANJAB BARAT		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	100 % 100 %			100 %	535.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	535.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				0 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				10 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				2 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.11.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Pembengis	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100 % 100 %			100 %	4.355.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT	100 % 100 %	1.905.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun				1 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		0,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau														
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				4 Unit	850.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara</i>				3 Unit	995.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		995.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1 - Peningkatan Produktivitas Daerah 4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	13 KECAMATAN DI KAB. TANJAB BARAT		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	<i>Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelen ggaraan Tata Kelola Pemerintah an dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.17	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.17.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.19	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	100 % 100 %			100 %	15.000.000,00			-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	100 % 100 %	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15.03.2.19.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Efisien, dan Melayani.	KECAMATAN TUNGKAL ILIR		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						50.000.000,00							50.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	100 %			-	50.000.000,00						100 %	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	4 Dokumen 4 Dokumen			-	50.000.000,00			-	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	-	0 Dokumen 0 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5 - Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.Mewujudkan Ketentr aman dan Ketertiban Umum	-		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	
	J U M L A H							17.687.765.435,00							14.994.249.974,00		



BAB IV

KESIMPULAN

4.1. KESIMPULAN

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Program Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung jabung Barat selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

4.2. KAIDAH – KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Bappeda Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, selanjutnya Renja Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Kuala Tungkal, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAMSUL UHARI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19701213 199203 1 001